

ANALYSIS OF BUDGET ABSORPTION IN PU OFFICE
MAKASSAR CITY AT THE TIME
COVID-19 PANDEMIC

Oleh :

Nurafianti La Hubi

Email : nurafiantilahubi@gmail.com

Pembimbing I :

Seri Suriani

Email : serisuriani06@gmail.com

Pembimbing II :

Ripa Fajarina

Email : ripafajarina@gmail.com

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa Makassar**

ABSTRACT

NURAFIANTI LA HUBI. 2022. *Thesis. Analysis of Budget Absorption in the Pu Office of Makassar city during the Covid-19 Pandemic was guided by Dr. Seri Suriani, S.E., M. Si and Ripa Fajarina L, S.E., M. Si., Ak., CA.*

This research is a qualitative descriptive study that aims to find out and analyze budget absorption in the Makassar City Public Works Office during the covid-19 pandemic.

The object of the research is the Makassar City Public Works Office. The method of data collection used is with literature studies, interviews, and documentation. The analysis method used is miles and huberman analysis.

The results showed that the Makassar City Public Works Office experienced poor budget absorption. This can be seen from the amount of budget realization compared to the budget that has been targeted in 2021. The percentage of budget absorption that occurred in 2021 amounted to 52.49%. Although there is an increase in the percentage of budget absorption of 1.22% in 2021 compared to the previous year but in reality the realization of this budget absorption is still categorized as less than expected. The realization of budget absorption that is still lacking in the Makassar City Public Works Office is caused by budget refocusing factors, government regulatory factors related to the Enactment of Community Activity Restrictions, budget planning factors, Human Resources (HR) quality factors of the auction / tender process, field condition factors and so on.

Keywords: *Budget Absorption, Public Sector Budget, Covid-19 Pandemic*

PENDAHULUAN

Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas PU Kota Makassar penyerapan anggarannya masih dikategorikan rendah. Ada Keunikan yang menarik terkait dengan administrasi keuangan, bahwa terdapat banyak sisa rencana keuangan dalam laporan pengakuan rencana keuangan. Sementara dalam Rencana Belanja Daerah (APBD) sebelumnya, pemerintah daerah memperkirakan akan ada kekurangan, yaitu pendapatan daerah tentu tidak dapat menutupi setiap konsumsi daerah. Tetapi pada kenyataannya penyerapan anggarannya tidak dapat terserap sepenuhnya. Ini tentunya dapat dilihat pada *pasca* refokusing anggaran Dinas PU Kota Makassar yang sekitar Rp 400 miliar, ternyata yang terserap hanya sekitar 50% atau Rp 200 miliar, sehingga anggaran sekitar Rp 200 miliar terpaksa harus kembali ke penyimpanan teritorial, dan berubah menjadi sisa perhitungan rencana keuangan (Tribun Makassar, 2021).

Tingkat asimilasi rencana keuangan rendah ini tidak diatur dalam hukum/peraturan tentang Rencana Belanja, namun mendekati akhir tahun anggaran, kantor-kantor pemerintah berusaha untuk mengasimilasi pengeluaran yang diatur mendekati 100%, sehingga tidak diputuskan bahwa retensi dari rencana keuangan rendah. Kekecewaan terhadap target retensi rencana keuangan ini menyebabkan berkurangnya manfaat dari pengeluaran, karena ternyata tidak semua aset yang dialokasikan dapat digunakan. Jika peruntukan anggaran sudah memadai, sumber kekayaan terbatas yang diklaim oleh negara dapat ditingkatkan untuk mensubsidi kegiatan-kegiatan penting. Sumber pendapatan negara yang terbatas mengharuskan otoritas publik untuk fokus pada prioritas kegiatan dan mendistribusikan rencana keuangan dengan cara yang efisien dan efektif. Apabila penyerapan anggaran belanja gagal mencapai tujuan, hal itu berarti telah terjadi ketidakefisienan dan ketidakefektifan porsi anggaran belanja (Carlin 2014). Zarinah et al (2016) berpendapat bahwa penyusunan rencana pengeluaran yang tidak menguntungkan adalah hambatan penting, dan merupakan satu-satunya elemen yang dapat memicu masalah yang tersisa dalam retensi rencana keuangan. Oleh karena itu, agar pengakuan pengeluaran diperluas, harus diikuti dengan penyusunan rencana konsumsi yang layak, sebab kebanyakan pengakuan rencana

pengeluaran yang ekstrim tanpa perencanaan yang matang dapat dianggap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. (Halim, 2017:97).

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukanlah penelitian ini yang dimaksudkan untuk menganalisis penyerapan anggaran khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar pada masa pandemi covid atau virus corona. Adapun judul penelitian ini yaitu **“Analisis Penyerapan Anggaran di Dinas PU Kota Makassar Pada Masa Pandemi Covid-19”**

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Sektor Publik

Menurut Halim dan Kusufi (2017: 48), rencana pengeluaran adalah arsip yang berisi ukuran pelaksanaan, baik sebagai pendapatan dan konsumsi yang dimasukkan dalam ukuran keuangan yang akan dicapai dalam kerangka waktu tertentu dan menggabungkan informasi masa lalu sebagai jenis kontrol dan pemeriksaan eksekusi.. Hal senada juga diungkapkan oleh Pekei (2016:13) yang mencirikan rencana pengeluaran sebagai pernyataan tentang pelaksanaan yang dinilai untuk dicapai selama periode tertentu yang dikomunikasikan dalam ukuran moneter atau tunai. Rencana belanja daerah sebagai bentuk tanggung jawab dari perintis hierarkis untuk memberikan data semua aktivitas dan kegiatan otoritatif kepada bawahannya atau instrumen tanggung jawab atas pengelolaan aset publik dan pelaksanaannya berupa rencana program yang dibiayai dengan kas publik (Sujarweni, 2015). Oleh karena itu, kas pada sektor publik memiliki beberapa karakteristik yaitu (Halim dan Kusufi, 2017:50):

1. Rencana pengeluaran dinyatakan dalam satuan moneter
2. Rencana keuangan sebagian besar mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa waktu, jangka pendek, menengah, dan panjang
3. Rencana keuangan berisi tanggung jawab atau kapasitas dewan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan
4. Usulan rencana keuangan diperiksa dan disahkan oleh otoritas yang lebih tinggi dari pembuat rencana keuangan
5. Saat disusun, rencana pengeluaran harus diubah dalam keadaan tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Pengakuan Rencana Belanja adalah salah satu bagian dari laporan moneter otoritas publik yang menyajikan data tentang pengakuan dan rencana keuangan unsur pengungkapan atas alasan yang saling berdampingan untuk periode tertentu (Astria et al: 2015).

Penyerapan Anggaran

Seperti yang ditunjukkan oleh Noviwijaya dan Rohman (2013), penyerapan rencana keuangan unit kerja adalah “proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau telah direalisasikan dalam satu tahun anggaran”. Memperkirakan penyerapan memerlukan sesuatu selain membandingkan aset yang dapat diakses dan pengeluaran asli. Terlepas dari apakah 100 persen dari rencana keuangan yang ditentukan dihabiskan mungkin ada keharusan asimilasi yang telah mendorong redistribusi aset dan tambahan ketidakmampuan untuk melaksanakan rencana kerja (*Ministry of Finance, Planning and Economic Development of Uganda, 2011*). Sampai saat ini, otoritas publik belum memiliki standar pengertian tentang tingkat suatu daerah yang masuk dalam kategori menghadapi konsumsi anggaran yang rendah. Meski demikian, beberapa daerah memiliki fakta integritas dan kemudian disahkan oleh pimpinan satker, bahwa suatu pemerintahan akan mengalami tidak adanya retensi rencana belanja jika sebelum tahun berakhir tidak dapat merealisasikan 90% dari rencana belanja yang telah diatur (Arif dan Halim, 2013)..

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (2017) ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan rencana keuangan, lebih spesifiknya: (1) Penyusunan rencana pengeluaran yang tidak berdaya; (2) Lamanya proses pembicaraan rencana keuangan; (3) Lambannya proses lelang/tender; dan (4) Perasaan takut untuk menggunakan rencana keuangan. Namun demikian, pada umumnya variabel-variabel yang mempengaruhi asimilasi rencana keuangan adalah: (1) faktor penyusunan; (2) unsur otoritatif; (3) Unsur (SDM); (4) komponen perolehan

barang dagangan/administrasi; (5) Unsur administrasi; (6) Unsur komitmen organisasi.

Covid-19

Covid-19 atau Covid diurutkan sebagai penyakit yang sangat berisiko yang dapat menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Covid adalah sekelompok besar infeksi yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan makhluk. Pada orang biasanya menyebabkan kontaminasi pernapasan, dari flu biasa hingga penyakit utama seperti Center East Respiratory Disorder (MERS) dan Intense Respiratory Condition (SARS). Penyakit ini pada prinsipnya menyebar ke semua orang melalui saluran pernapasan dari hacking (tetes) dan bersin (Putra et al., 2020).

METODE ANALISIS

Jenis penelitian ini adalah eksplorasi subjektif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sugiyono (2016: 244) mengatakan bahwa analisis informasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan secara metodis informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara memilah-milah informasi ke dalam klasifikasi, memisahkan menjadi unit, menggabungkan, mengumpulkan ke dalam kelas atau pola, memilih apa yang signifikan dan apa yang akan dipelajari, dan mencapai kesimpulan. Dengan tujuan agar mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1992: 16) uji ini terdiri dari tiga alur aktivitas yang terjadi secara bersamaan, lebih spesifik: reduksi informasi, penyajian informasi, penarikan/konfirmasi akhir.

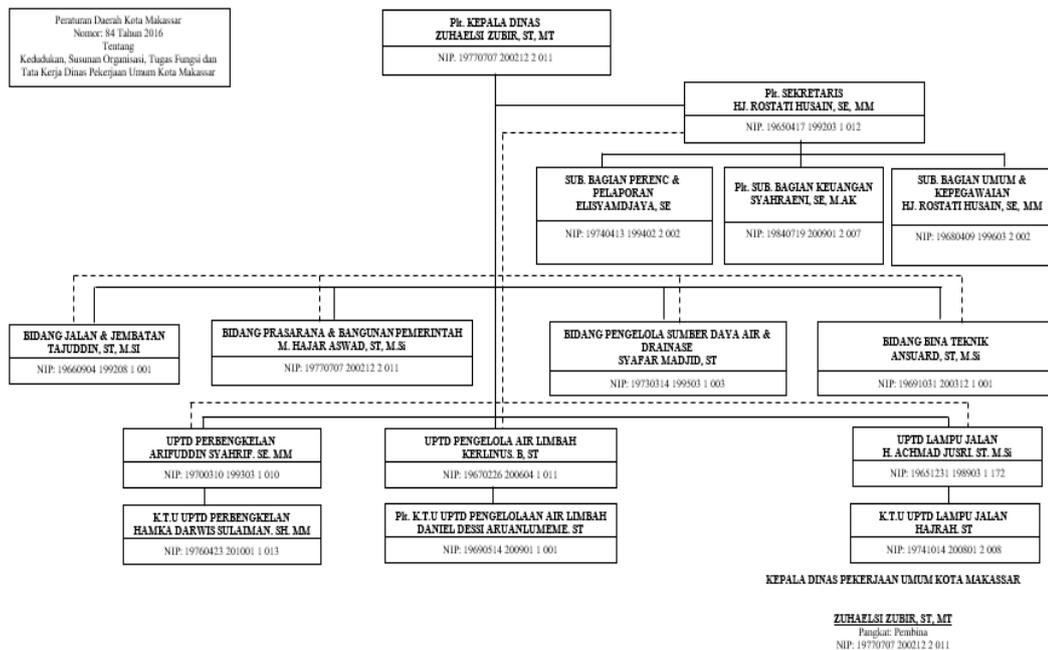
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar ialah kantor Dinas PU untuk wilayah Makassar, provinsi Sulawesi Selatan. Adapun visinya yaitu: “Mewujudkan Infrastruktur ke-PU-an yang Berkualitas dan Berkearifan Lokal”.

Sedangkan misinya yaitu: Mendorong kualitas dan perawatan yang kuat untuk pembangunan jalan dan jembatan; Memperluas peningkatan struktur konstruksi air terkoordinasi yang didukung oleh sistem informasi database untuk pelayanan yang berkisanambungan; Mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan landasan ekologis sterilisasi untuk disinfeksi lingkungan pemukiman; Mengembangkan kualitas manajemen kelembagaan berbasis *e-government* yang bertanggung jawab dan bersinergi dengan berbagai bidang dalam menghadapi pasar dunia.

Berikut ditampilkan desain hirarkis Dinas PU Kota Makassar, di bawah ini.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyerapan Anggaran Dinas PU Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2021

Penyerapan rencana keuangan menggambarkan kapasitas pemerintah daerah untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang telah diorganisir (Mardiasmo, 2009). kapasitas konsumsi rencana moneter dipandang besar dan bermanfaat jika pengakuan asimilasi rencana pengeluaran sesuai dengan pekerjaan nyata yang dapat diselesaikan, dengan harapan pekerjaan

nyata yang sebenarnya cukup setara dengan fokus pemenuhan yang diatur dari rencana keuangan dan kinerja (Nugroho dan Ananda, 2013).

Asimilasi rencana pengeluaran diperkirakan dengan mempertimbangkan seberapa besar rencana keuangan dapat dipertahankan setiap tahun (Kuswoyo, 2011). Tahap asimilasi rencana pengeluaran mulai dari penyusunan rencana keuangan, penetapan rencana keuangan dan pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), konsumsi rencana pengeluaran dan pertanggungjawaban anggaran. Ketika penyerapan rencana keuangan yang tidak sesuai dengan tujuan, hal ini mengakibatkan adanya kekurangan dan ketidakcukupan porsi rencana pengeluaran (BPKP, 2011).

Adapun kriteria serapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Kinerja Anggaran

Presentase	Kriteria
>90% - ≤100%	Sangat Baik
>80% - ≤ 90%	Baik
>60% - ≤ 80%	Cukup
>50% - ≤ 60%	Kurang
- ≤ 50%	Sangat Kurang

Sumber: PMK No.249/PMK.02/2011

Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar ada 2 (dua) program dilaksanakan, yakni Program penunjang/pendukung (Program penunjang urusan pemerintah daerah) dan Program utama (Program penyelenggaraan jalan; Program penataan bangunan gedung; Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah; Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; Program pengembangan jasa konstruksi). Sedangkan penganggaran pada Dinas PU Kota Makassar dibagi ke dalam dua belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rekapitulasi Belanja Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja operasi		
	a. Belanja pegawai	Rp. 21.447.624.000	Rp. 19.968.184.374
	b. Belanja barang dan jasa	Rp. 178.599.557.358	Rp. 126.140.669.148
	c. Belanja hibah	Rp. 73.579.500.000	Rp. 35.078.480.961
2	Belanja modal		

a. Belanja modal tanah	Rp. 0	Rp. 0
b. Belanja modal peralatan dan mesin	Rp. 14.130.190.970	Rp. 5.832.725.500
c. Belanja modal gedung dan bangunan	Rp. 24.083.455.630	Rp. 1.131.221.500
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp. 327.261.898.476	Rp. 147.293.610.436

Sumber: Dinas PU Kota Makassar, 2022

Dari tabel 4.2 rekapitulasi diatas dapat diuraikan sebagai berikut: untuk anggaran belanja kegiatan terbagi atas dua jenis belanja, yaitu: belanja operasi sebesar Rp 273.636.681.773, dengan realisasi belanja sebesar Rp. 181.187.334.483, atau serapan anggaran sebesar 66.22%. Belanja modal sebesar Rp. 365.475.545.076, dengan realisasi sebesar Rp. 154.257.557.436, atau serapan anggaran sebesar 42,21%

Adapun nominal realisasi anggaran Dinas PU kota Makassar pada Tahun Anggaran 2021 ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Dinas PU kota Makassar Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	BOBOT (%)	REALISASI SAMPAI BULAN DESEMBER			SISA DANA
				KOMULATIF		DANA	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)		
1	2	3	4	5	6	9	10=3-9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.265.444.189	8,80	78,31	74,59	41.969.176.379	14.296.267.810
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.716.290.360	1,05	22,62	22,51	1.511.973.286	5.204.317.074
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.322.168.000	0,36	43,28	43,18	1.002.822.248	1.319.345.752
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	75.786.802.640	11,86	47,85	42,93	32.533.150.887	43.253.651.753
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	105.227.927.780	16,46	40,45	34,84	36.662.969.139	68.564.958.641
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	391.305.208.880	61,23	58,44	56,47	220.976.110.320	170.329.098.560
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.478.385.000	0,23	64,04	53,35	788.689.660	689.695.340
BELANJA DAERAH		639.102.226.849	100,00	55,55	52,49	335.444.891.919	303.657.334.930

Sumber: Dinas PU kota Makassar, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, dapat di uraikan sebagai berikut: Pencapaian indikator program kinerja program program penunjang urusan pemerintah daerah didukung oleh penetapan rencana pengeluaran sejumlah Rp. 56.265.444.189 dengan total realisasinya sejumlah Rp. 41.969.176.379, atau 74.59%; Pencapaian indikator program kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem

penyediaan air minum didukung oleh penetapan rencana pengeluaran sejumlah Rp. 6.716.290.360 dengan total realisasinya sejumlah Rp. 1.511.973.286, atau 22.51%; Pencapaian indikator program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah didukung oleh penetapan rencana pengeluaran sejumlah Rp. 2.322.168.000 dengan total realisasinya sejumlah Rp 1.002.822.248, atau 43.18%; Pencapaian indikator program kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase didukung oleh penetapan rencana pengeluaran sejumlah Rp. 75.786.802.640 dengan total realisasinya sejumlah Rp. 32.533.150.887, atau 42.93%; Pencapaian indikator program kinerja program penataan bangunan gedung didukung oleh penetapan rencana pengeluaran sejumlah Rp. 105.227.927.780 dengan total realisasinya sejumlah Rp. 36.662.969.139, atau 34.84%; Pencapaian indikator program kinerja program penyelenggaraan jalan kab/kota didukung oleh penetapan rencana pengeluaran sejumlah Rp. 391.305.208.880 dengan total realisasinya sejumlah Rp. 220.976.110.320, atau 56.47%; Pencapaian indikator program pengembangan jasa konstruksi didukung oleh penetapan rencana pengeluaran sejumlah Rp. 1.478.385.000 dengan total realisasinya sejumlah Rp. 788.689.660, atau 53.35%. Pada tabel 4. 3 tersebut juga dapat kita ketahui jumlah pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 639.102.226.849 dan realisasi anggaran sampai akhir Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 335.444.891.919. Adapun sisa anggaran yang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada tahun 2021 sejumlah Rp. 303.657.334.930, atau tingkat capaian realisasi anggaran sebesar 52,49%.

Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyerapan Anggaran Dinas PU Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2021

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Faktor penghambat pencapaian program ini yaitu: Adanya perubahan rincian/item/titik lokasi pekerjaan dalam proses pelaksanaan sehingga penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan.; Untuk kegiatan yang besumber dari DAK, pengadaan pembangunan jaringan air bersih/air minum yang ada di Kel. Bira Kec. Tamalanrea masih dalam tahap perpanjangan waktu

peyelesaian pekerjaan sampai dengan 31 Januari 2022; Tidak tersedianya sarana teknologi yang tepat dalam mendeteksi ketersediaan air dan kualitas air dalam tanah.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah

Faktor penghambat pencapaian program ini yaitu: Adanya perubahan rincian pada DPA perubahan TA 2021; Terkendala izin untuk melakukan kegiatan sosialisai/pembinaan ke kelompok pengelola Ipal Komunal, warga pengguna ipal komunal karena masih berlakunya aturan pembatasan kegiatan masyarakat; Adanya kegiatan fisik/DAK sanitasi yang tidak dilaksanakan karena masih terkendala aturan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat; Beberapa item kebutuhan pendukung kegiatan pada E-katalog/E-purchasing belum tersedia.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Faktor penghambat pelaksanaan program ini yaitu: Perencanaan yang kurang matang sehingga proses tender/lelang yang lambat; Terbatasnya peralatan yang digunakan oleh tim satgas dilapangan mengakibatkan pekerjaan kurang maksimal; Banyaknya drainase tidak menggunakan ventilasi saluran pembuangan (bukaan kontrol), sehingga menyulitkan pekerja dapat melihat keadaan saat dilapangan; Terlambatnya penyelesaian pekerjaan.

Program Penataan Bangunan Gedung

Faktor penghambat pencapaian Program ini yaitu: Tidak terlaksananya beberapa kegiatan pembangunan gedung pemerintahan karena adanya refofusing anggaran; Waktu pelaksanaan pekerjaan fisik yang terbatas/tidak mencukupi; Adanya perubahan/penambahan item pekerjaan sehingga pekerjaan konstruksi mengalami kendala dalam pelaksanaan; Proses tender/lelang yang lambat.

Program Penyelenggaraan Jalan

Faktor penghambat pencapaian program ini yaitu: Adanya perubahan/review design (perubahan spesifikasi dan metode pekerjaan); Terlambatnya proses lelang/gagal lelang karena peserta lelang tidak ada yang memenuhi kualifikasi/persyaratan; Tingkat keahlian kontraktor yang kurang

kompeten; Pengawas yang kurang profesional; Adanya keterbatasan beberapa bahan/material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Faktor penghambat pelaksanaan program ini yaitu: Refocusing anggaran; Adanya aturan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga kegiatan sosialisasi/pelatihan/workshop tidak terlaksana; Masih kurangnya SDM tenaga operator/analisis/tenaga konstruksi yang terampil dan bersertifikasi kompetensi; Masih kurangnya SDM Tim Pengawas konstruksi yang terampil dan bersertifikasi kompetensi

PENUTUP

Kesimpulan

Mengingat hasil penelitian mengenai penyerapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar pada masa pandemi covid-19, maka dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar masih kurang. Itu cenderung terlihat dari jumlah realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana pengeluaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2021. Adapun besarnya presentase penyerapan anggaran pada tahun 2021 sebesar 52,49%. Meskipun terdapat kenaikan presentase penyerapan anggaran sebesar 1,22% pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya tapi pada kenyataannya realisasi penyerapan anggaran ini masih di kategorikan kurang dari yang diharapkan. Realisasi penyerapan anggaran yang masih kurang ini disebabkan oleh faktor refocusing anggaran, faktor peraturan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), faktor penyusunan rencana anggaran, kualitas SDM, proses lelang/tender, kondisi lapangan dan lain sebagainya.

Saran

Mengingat kesimpulan di atas, maka cenderung diusulkan saran-saran sebagai pelengkap hasil penelitian, yaitu: Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar melakukan koordinasi dengan baik bersama pihak internal dan

eksternal dalam penyusunan anggaran lebih akurat dan baik sesuai dengan kebutuhan; Diharapkan Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar membuat jadwal lelang lebih cepat sebelum tahun anggaran dimulai dan proses lelang pengadaan barang/jasa bisa dilaksanakan diawal tahun; Diharapkan kepada para aparatur pemerintah/SDM Dinas Pekerjaan Umum kota Makassar untuk dapat meningkatkan kompetensi dibidangnya masing-masing dengan upaya-upaya yang ditempuh berupa pendidikan, edukasi, *training*, seminar ataupun aktivitas mendukung peningkatan kemampuan kinerja; Menerapkan sistem penghargaan dan hukuman/disiplin bagi seluruh pegawai untuk peningkatan kinerja pegawai; Dalam hal kerjasama, perencanaan harus lebih ditingkatkan dalam melakukan koordinasi dengan SKPD terkait agar siklus pembangunan yang telah dilaksanakan dapat mencapai pada tujuan yang diharapkan; Meningkatkan kerjasama kelompok masyarakat, baik dalam proses penyusunan maupun perencanaan, sehingga keterusterangan akan lebih dipahami/terwujud; Dalam memutuskan penyusunan laporan penilaian sebaiknya sesuai dengan amanat peraturan dan pedoman yang berlaku, hal ini dapat dilakukan dengan merujuk pada rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Syam Kusufi. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arif, E. dan A. Halim. 2013. **Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011**. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28.
- Astria. 2015. *Analisis laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pada kantor dinas pendapatan daerah kota bitung, Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*
- Beni Peki. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Buku 1*. Jakarta Pusat : Taushia
- Bima Jati, B. J., & Putra, G. R. A. (2020). **Optimalisasi Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pandemi Covid 19 Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Warga Negara**. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). Retrieved from <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15316>
- Carlin, Tasya Putri. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik (Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Iwan, Dwi Kuswoyo. 2011. **Faktor-faktor Penyebab Penumpukan Anggaran Belanja di akhir Tahun Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri**. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mashudi, Adi Nugroho. 2013. **Analisis Faktor-faktor yang menyebabkan Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir tahun (Studi Kasus di KPPN Malang)**. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Noviwijaya., A. Dan Rohman., A. 2013. **Pengaruh Keragaman Gender dan Usia Pejabat Perbendaharaan Terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja (Studi Empiris pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Semarang I)**. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 2, No. 3, Hlm 1.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) No : PER-1633/K/Jf/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Zarinah, M., Darwanis & Abdullah, S. (2016). **Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat**



Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(1).